



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Azna Githa Prapanca¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Bayu Septiansyah³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam program pembinaan anak jalanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, serta pembinaan sosial bagi anak jalanan agar mereka dapat keluar dari kondisi rentan dan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Studi ini mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik, mencakup faktor sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam upaya pemberdayaan anak jalanan, baik melalui pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, maupun bantuan sosial. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendamping sosial, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan regulasi, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program pembinaan anak jalanan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, anak jalanan, pemerintah daerah, pembinaan sosial, Dinas Sosial.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of local government policies in the street children empowerment program carried out by the Social Service Office of Cianjur Regency. This program is designed to provide protection, education, and social development for street children, helping them transition out of vulnerable conditions and gain better opportunities in social and economic life. The study examines the effectiveness of policy implementation using a public policy analysis approach, focusing on resource availability, inter-agency coordination, and community participation in supporting the program. The findings indicate that the implementation of this policy has had a positive impact on the empowerment of street children through non-formal education, skills training, and social assistance. However, several challenges remain, including budget constraints, a lack of social workers, and suboptimal coordination between local governments, social institutions, and the community. To enhance program effectiveness, it is necessary to strengthen

regulations, allocate adequate funding, and increase the active role of various stakeholders in ensuring the sustainability of the street children empowerment program.

Keywords: *policy implementation, street children, local government, social development, Social Service Office.*

PENDAHULUAN

Permasalahan anak jalanan merupakan isu sosial yang kompleks dan multidimensional, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan sosial di Indonesia. Anak jalanan, secara umum, merujuk pada individu berusia 5–18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum, baik untuk mencari nafkah maupun sekadar berkeliaran tanpa pengawasan orang dewasa. Keberadaan mereka tidak hanya menandakan kegagalan sistem perlindungan sosial, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial-ekonomi yang masih mengakar kuat di masyarakat. Anak-anak ini rentan terhadap eksploitasi, kekerasan fisik dan psikologis, penelantaran, penggunaan narkoba, hingga penyalahgunaan seksual, yang semuanya berdampak langsung pada perkembangan mental, emosional, dan masa depan mereka. Penyebab munculnya fenomena anak jalanan tidak bisa dilihat secara tunggal. Kemiskinan struktural, urbanisasi yang tidak terkelola, disintegrasi keluarga, kurangnya akses pendidikan, hingga lemahnya sistem perlindungan anak menjadi pemicu utama. Dalam konteks ini, keberadaan anak jalanan bukanlah sekadar masalah moralitas atau ketertiban umum, tetapi sudah masuk ke ranah hak asasi manusia, terutama hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Pemerintah pusat maupun daerah, melalui berbagai regulasi dan program, telah mencoba merespons fenomena ini, salah satunya dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembinaan anak jalanan.

Secara yuridis, upaya negara dalam menangani persoalan anak jalanan memiliki landasan kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kedua regulasi ini menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan

pembinaan terhadap anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak jalanan. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur menindaklanjuti kebijakan nasional ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial, yang salah satunya mencakup sasaran utama kepada anak-anak jalanan.

Dalam konteks Kabupaten Cianjur, fenomena anak jalanan menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, jumlah anak jalanan menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Tahun 2021 tercatat sebanyak 203 anak jalanan, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 153 jiwa, namun kembali meningkat menjadi 210 jiwa pada tahun 2023. Bahkan tidak sedikit anak jalanan yang tercatat berdomisili di luar Kabupaten Cianjur, seperti dari Bandung Barat dan Sukabumi, yang secara geografis berbatasan langsung. Keberadaan mereka tersebar di berbagai lokasi strategis seperti perempatan jalan, terminal, pusat perbelanjaan, dan kawasan wisata, yang menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi masalah sistemik dan lintas wilayah.

Sebagai upaya implementasi kebijakan, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaan anak jalanan. Program ini mencakup identifikasi dan pendataan anak jalanan, penyuluhan dan konseling, pelatihan keterampilan kerja, hingga reintegrasi sosial dan pemberian bantuan sosial. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan yang komprehensif, sehingga anak-anak tersebut dapat keluar dari siklus kemiskinan dan marginalisasi. Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik dari sisi internal institusi maupun faktor eksternal masyarakat dan lingkungan.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Sosial masih menghadapi keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga pendamping profesional, serta minimnya fasilitas pendukung seperti rumah singgah dan tempat pelatihan keterampilan yang layak. Di sisi lain, faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya dukungan keluarga, dan budaya memberi uang kepada anak jalanan di jalanan, turut menghambat efektivitas program

pembinaan yang dijalankan. Tidak hanya itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi lain seperti Satpol PP, lembaga swadaya masyarakat, maupun komunitas peduli anak, masih belum berjalan optimal. Padahal, permasalahan anak jalanan sejatinya memerlukan pendekatan kolaboratif dan multisektoral.

Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya. Implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, mencakup proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, menilai efektivitas implementasi program pembinaan anak jalanan tidak cukup hanya melihat output program, tetapi juga perlu mengevaluasi proses dan mekanisme kerja kebijakan tersebut.

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimana implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dalam menjawab permasalahan yang ada, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik sebagai pisau analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perbaikan kebijakan sosial di tingkat daerah.

Lebih dari sekadar evaluasi administratif, kajian ini memiliki nilai strategis dalam menilai komitmen dan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan sosialnya. Sebab, keberhasilan suatu kebijakan sosial tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kebijakan tersebut dirancang, tetapi juga oleh seberapa besar keseriusan dan kapasitas aktor-aktor pelaksananya dalam menjalankan program secara berkelanjutan. Terlebih lagi, dalam isu anak jalanan, peran negara dan pemerintah daerah tidak dapat digantikan oleh aktor manapun, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi muda yang seharusnya dilindungi dan dibina, bukan dibiarkan menjadi korban dari sistem yang gagal.

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya bermaksud memberikan gambaran empiris tentang kebijakan dan program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Cianjur, tetapi juga ingin mendorong refleksi yang lebih luas tentang pentingnya pendekatan yang partisipatif, berbasis hak anak, dan bersifat intersektoral dalam menangani masalah sosial yang kompleks. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam konteks pembangunan sosial di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antaraktor kebijakan, konteks pelaksanaan program, serta persepsi dan pengalaman dari para pelaksana maupun penerima manfaat kebijakan. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program tersebut.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Cianjur, dengan unit analisis utama adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai instansi pelaksana kebijakan pembinaan anak jalanan. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri dari pejabat struktural Dinas Sosial, petugas lapangan atau pendamping sosial, perwakilan organisasi mitra, serta beberapa anak jalanan yang pernah menjadi sasaran program. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kebijakan, lama bekerja di bidang sosial, dan kapasitas dalam memberikan data yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan studi

dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi tentang implementasi kebijakan, strategi pelaksanaan, serta hambatan dan solusi yang dihadapi. Observasi dilakukan terhadap proses kegiatan pembinaan anak jalanan di lapangan, seperti kegiatan penyuluhan, pelatihan keterampilan, dan interaksi antara petugas dengan anak-anak binaan. Sedangkan studi dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi seperti regulasi daerah, laporan program, data statistik, serta laporan evaluasi dari instansi terkait.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilah informasi yang relevan sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan pola-pola, kecenderungan, dan hubungan antarvariabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan hasil interpretasi dan sintesis data yang telah dianalisis. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh validitas informasi.

Dengan menggunakan pendekatan dan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan di Kabupaten Cianjur, serta memberikan masukan konstruktif bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

Pelaksanaan program pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah menunjukkan adanya dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Program ini

mencakup beberapa aspek penting, seperti rehabilitasi sosial, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta pemberian bantuan sosial. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian agar efektivitas program dapat ditingkatkan.

1. Implementasi Kebijakan: Gambaran Umum

Kebijakan pembinaan anak jalanan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Sosial merupakan bentuk komitmen terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam kerangka itu, program pembinaan anak jalanan diarahkan untuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, reintegrasi sosial, hingga pemberian bantuan sosial yang bertujuan agar anak-anak jalanan dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih layak dan produktif.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi banyak hambatan yang membuat hasil yang dicapai belum sesuai dengan target ideal. Menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, pembahasan ini menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan tersebut, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) sikap pelaksana, (5) komunikasi antarlembaga, dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

2. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara formal, kebijakan ini telah memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, yakni mengurangi jumlah anak jalanan dan memperbaiki kualitas hidup mereka melalui berbagai bentuk intervensi sosial. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa sasaran tersebut masih terlalu umum dan belum didukung dengan indikator kinerja yang terukur secara konkret. Beberapa pihak, seperti Satpol PP, mengeluhkan bahwa dalam proses penertiban anak jalanan, tidak selalu diikuti oleh mekanisme rehabilitasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Program pembinaan yang seharusnya berfokus pada rehabilitasi jangka panjang seringkali hanya bersifat reaktif dan sementara. Akibatnya, banyak anak jalanan yang sudah dibina justru kembali ke jalan karena tidak ada dukungan pasca-program yang memadai. Ini menunjukkan lemahnya sistem monitoring dan keberlanjutan (sustainability) program.

3. Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan aspek paling krusial yang mempengaruhi keberhasilan program pembinaan anak jalanan. Dalam konteks Kabupaten Cianjur, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama yang menghambat implementasi secara maksimal. Selain itu, jumlah tenaga pendamping yang terlatih juga sangat terbatas. Akibatnya, daya jangkauan program menjadi rendah dan belum mampu merespons jumlah anak jalanan yang terus bertambah.

Salah satu bentuk keterbatasan sumber daya juga terlihat pada minimnya fasilitas pendukung, seperti rumah singgah, pusat pelatihan, dan alat bantu psikososial. Dinas Sosial sering kali harus mengandalkan sumber daya internal yang tidak memadai, tanpa adanya sinergi yang optimal dengan pihak lain seperti LSM, sektor swasta, atau masyarakat sipil. Padahal, kerjasama lintas sektor dapat memperluas cakupan layanan dan meningkatkan kualitas pembinaan.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Sebagai instansi teknis, Dinas Sosial memiliki struktur kelembagaan yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021. Namun, pelaksanaan program masih sangat tergantung pada kapasitas internal organisasi. Organisasi pelaksana juga belum sepenuhnya adaptif dalam menjalin kemitraan strategis. Fungsi koordinasi dengan lembaga lain, seperti Satpol PP, Dinas Pendidikan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem yang solid.

Minimnya keterlibatan LSM dan masyarakat menjadi salah satu titik lemah dalam desain kelembagaan. Lembaga sosial sebenarnya memiliki kekuatan pada pendekatan akar rumput dan pemahaman terhadap kondisi

lokal, namun dalam implementasi di Cianjur, mereka hanya dilibatkan pada kegiatan tertentu secara insidental.

5. Sikap Pelaksana

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sikap dan komitmen para pelaksana di lapangan sebenarnya cukup positif. Mereka menyadari pentingnya peran mereka dalam mengubah kehidupan anak jalanan, dan berupaya memberikan pendampingan yang humanis. Namun demikian, komitmen tinggi ini tidak selalu dibarengi dengan dukungan struktural yang memadai. Banyak petugas yang merasa kewalahan karena harus menangani jumlah anak yang lebih besar dari kapasitas yang tersedia.

Di sisi lain, tidak semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pendekatan terhadap anak jalanan. Misalnya, pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP cenderung bersifat represif karena fungsinya sebagai penegak peraturan, sedangkan Dinas Sosial lebih menekankan aspek rehabilitatif. Perbedaan perspektif ini menunjukkan pentingnya pelatihan lintas sektor agar seluruh pelaksana memiliki pendekatan yang sejalan dan sensitif terhadap isu anak jalanan.

6. Komunikasi Antar organisasi

Komunikasi antarlembaga menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini. Dalam banyak kasus, penertiban anak jalanan oleh Satpol PP tidak selalu dilanjutkan dengan tindakan rehabilitasi oleh Dinas Sosial karena tidak ada sistem koordinasi yang efektif. Informasi mengenai anak jalanan yang sudah terjaring pun tidak selalu diteruskan secara akurat, sehingga proses pembinaan menjadi terputus dan tidak berkelanjutan. Idealnya, setiap instansi yang terlibat memiliki saluran komunikasi yang terstruktur melalui forum koordinasi lintas sektor yang rutin. Namun, dalam praktiknya, koordinasi yang terjadi masih bersifat informal dan sporadis. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya bersifat sinergis berubah menjadi kegiatan yang terfragmentasi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya duplikasi program, ketidakefisienan anggaran, dan hilangnya target sasaran program.

7. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Banyak anak jalanan yang kembali ke jalan setelah menyelesaikan program pembinaan karena tekanan ekonomi keluarga yang tinggi. Kurangnya peluang kerja, minimnya akses pendidikan lanjutan, dan stigma masyarakat terhadap anak jalanan membuat mereka sulit mendapatkan kesempatan baru yang lebih baik.

Dari sisi sosial, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembinaan anak jalanan juga menjadi persoalan. Banyak warga yang tidak mengetahui bagaimana mereka bisa terlibat atau berkontribusi. Padahal, lingkungan sekitar sangat berperan dalam proses reintegrasi anak ke masyarakat.

Sementara itu, dari segi politik, keberlanjutan program sering kali tergantung pada stabilitas anggaran dan kebijakan. Perubahan kepemimpinan atau pergeseran prioritas anggaran daerah dapat memengaruhi kelangsungan program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang berorientasi jangka panjang dan memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak mudah berubah oleh dinamika politik lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur telah membawa dampak positif dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi anak jalanan. Program ini telah mencakup berbagai aspek penting, seperti rehabilitasi sosial, pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, serta pemberian bantuan sosial. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Anggaran yang tersedia masih belum cukup untuk menjangkau seluruh anak jalanan yang membutuhkan pembinaan, sementara jumlah tenaga pendamping sosial masih sangat terbatas sehingga belum mampu memberikan perhatian yang optimal bagi setiap anak. Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial, lembaga sosial, dan masyarakat masih belum optimal, yang menyebabkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan program serta kurangnya pemantauan terhadap anak-anak yang telah menerima pembinaan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak jalanan juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang masih memiliki kebiasaan memberikan uang secara langsung kepada anak jalanan di jalanan, yang justru memperkuat pola eksploitasi dan menghambat upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mendukung anak jalanan melalui jalur yang lebih tepat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa sebagian anak jalanan yang telah mengikuti program pembinaan masih mengalami kesulitan dalam memperoleh peluang ekonomi yang stabil setelah keluar dari program. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa mereka benar-benar dapat mandiri setelah menyelesaikan program pembinaan. Pendekatan berbasis keluarga juga perlu diperkuat agar anak-anak yang telah direhabilitasi mendapatkan lingkungan sosial yang lebih mendukung.

Untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan anak jalanan di Kabupaten Cianjur, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan alokasi anggaran, penambahan tenaga pendamping sosial, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi program. Dengan adanya perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak jalanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. M (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- A. G Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Mulyadi (2015), *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Nuhfil Hanani AR, Jabat Tarik Ibrahim, Mangku Purnomo (2003). *Strategi pembangunan pertanian: sebuah pemikiran baru*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.
- I Nyoman Sumaryadi (2018). *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia
- Indonesia Tresiana, N. & Djuaji, N. (2017). *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-model*
- Kadir, Abdul. 2015. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*, CV.Dharma Persada- Dharmasraya

Pengelolaan Pembangunan Daerah. Bandar Lampung: Suluh Media
Subarsono AG, 2005, Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi,
PustakaPelajar; Yogyakarta
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Bandung; Alfabeta

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembentukan
Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan
Perda Kabupaten Cianjur No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan
Penanganan Kesejahteraan Sosial.